

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bonta, James, dan Donald A. Andrews. *The Psychology of Criminal Conduct*. 6th ed. New York: Routledge, 2016.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press, 1968.
- Waluyo, Bambang. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Waluyo, Bambang. *Penerapan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

- Criminal Act of South Korea (형법), Pasal 51 dan Pasal 52. Disahkan pada tahun 1953. Kitab
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-43.PK.01.05.06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 150).
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263.
- Republik Indonesia, 2012, *Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263.
- Republik Indonesia, 2018, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat*.
- Republik Indonesia, 2022, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143.

Republik Indonesia, 2023, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia*, disahkan melalui *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*.

Republic of Korea, 1953, *Criminal Act of Korea*, WIPO Lex, diakses dari <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kr/kr168en.html>.

Republic of Korea, 2020, *Act on the Execution of Criminal Penalties and Treatment of Inmates*, Korea Legislation Research Institute, diakses dari https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=28627&lang=ENG.

Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP lama Indonesia, diadaptasi dari Wetboek van Strafrecht sejak masa kolonial Belanda dan berlaku sejak 1946.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Pasal 100. Disahkan melalui *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*.

Jurnal

Ainuddin, A. (2022). *Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Unizar Law Review (ULR), 5(1). <http://dx.doi.org/10.53726/ulr.v5i1.558>

Cahya, N. K. N. D., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). *Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) terhadap Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(1), 137-142. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2200.137_142

Cut Nurita. (2025). *Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi*. Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 7, No. 1, hlm. 139–152.

Fitri, E., & Wahyudhi, D. (2023). *Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*. PAMPAS: Journal of Criminal. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26990> Law, 4(2), 201-212.

Han Seong-hoon, 2022, *Suatu studi tentang cara merevitalisasi sistem pembebasan bersyarat saat ini*, Hukum Hongik, Vol. 23, No. 3, hlm. 255–275.

Harefa, Arianus. (2023). *Pembebasan Bersyarat sebagai Upaya Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas II B Gunungsitoli*. JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) 6, no. 2: 205–211. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.335>.

Jo Jun-hyun, 2012, *Ide dan Praktik Pembebasan Bersyarat*, Jurnal Ortodonti, Vol. 56, hlm. 7–43.

Khomaini, K., Thalib, H., & Nuh, M. S. (2021). *Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(2), 415-431. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26990> Law, 4(2), 201-212.

- Lee, H. (2021). *A critical review on the current operation and the future direction to improvement of the parole system*. *Correction Review*, 89, 3-30.
<https://doi.org/10.14819/krscs.2021.31.1.1.3>
- Maesty, A. D. P., & Soeskandi, H. (2022). *PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI*. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, 2(3), 1214–1240.
<https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.117>
- Manalu, D., Guntara, D., & Abas, M. (2023). *Implementasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Karawang Dihubungkan Dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 89–101. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8063485>
- Martha, A. E., & SH, M. (2020). *Philosophical and Comparative Studies Between the Concept of Criminal Attempt in Indonesian Penal Code and South Korean Penal Code*.
- Maulana, Irshandy, dan Mitro Subroto. (2022). *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagai Wujud Reintegrasi Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 6: 2791–2801.
- Normilawati, Affandi, dan M. Fahrudin Andriyansyah. (2023). *Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. *DINAMIKA*, Vol. 29, No. 1, Januari, hlm. 7154–7167.
- Nur Wahyuni. (2024). *Perbandingan Administrasi Negara Indonesia Dengan Korea Selatan*. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 9(8), 23–36.
<https://ejournal.irpia.or.id/index.php/irpia-jurnal/article/view/245>
- Park Mi-rang, Lim Ji-young, dan Kang Ho-seong, (2019). *Sebuah studi empiris mengenai durasi penahanan praperadilan dan keputusan pembebasan bersyarat*, *Wacana Pemasyarakatan*, Vol. 13, No. 3, hlm. 227–261.
- Prasetya, Anggi, dan Syafri Hariansah. (2025). *Mengkaji Ulang Pertanggungjawaban Sistem Pembebasan Bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. *Diversi: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (April): 98–121.
- Romadani, Aldi, Mahmuzar, dan Irfan Ridha. (2023). *Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan*. *Journal of Sharia and Law* 2, no. 1: 335–349.
- Saleh, R., & Hisbullah, H. (2020). *Analisis Hukum Pemberian Remisi Dalam Tindak Pidana Pencurian*. *Alauddin Law Development*
<https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15399> *Journal*, 2(2), 249-256.
- Utami, A. R., Suyadi, S., & Wahyudi, S. (2020). *Perbandingan Asas Legalitas di Indonesia dan Korea Selatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Kitab Undang-Undang*

Hukum Pidana Indonesia dan Criminal Code of Republic of South Korea).
Soedirman Law Review, 2(1). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2020.2.1.11>

Wang, J., & Xia, Y. (2023). *A Study of the Korean Criminal Hesitation System in the Perspective of Comparative Law*. SHS Web of Conferences, ICPRSS 2023, 178, 02009. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202317802009>

Yunita, Rr. Rina Antasari, dan Armasito. (2023). *Pengaturan Pembebasan Bersyarat bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol. 7, No. 2 (Desember): 111–127.

Lainnya

Yurisprudensi dan Praktik Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat: Penilaian Tim Pengamat Pemasyarakatan, Dokumen Pendukung, dan Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan